

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki beragam kekayaan alam, dan budaya. Karena luasnya wilayah Indonesia maka di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Kekayaan alam dan budaya menjadikan Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki keunggulan dalam kekayaan budaya ataupun kekayaannya. Dengan adanya potensi di setiap daerah di Indonesia ini maka tidak heran apabila setiap wilayah memiliki destinasi pariwisata yang begitu banyak. Pemerintah memanfaatkan potensi pariwisata ini sehingga dapat dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara.

Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, sektor pariwisata ini memberikan kontribusi yang begitu besar bagi pendapatan daerah ataupun negara. Sektor pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menempati urutan ke-4 atau ke-5 sebagai penghasil devisa negara terbesar di Indonesia (Matthoriq et al., 2021). Berikut merupakan jumlah devisa sektor pariwisata (Miliar US \$) dari tahun 2017-2018:

Tabel 1. 1
Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (Miliar US \$) Dari Tahun 2016-2018

NO	Tahun	Pendapatan (Miliar US \$)
1	2016	11.206
2	2017	13.139
3	2018	16.426

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Pengembangan sektor pariwisata adalah salah satu upaya pemanfaatan potensi yang ada di setiap daerah, sebagai contohnya adalah kekayaan alam, peninggalan sejarah, dan budaya flora dan fauna. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, di Indonesia terdapat 4 pilar pembangunan pariwisata di Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Industri Pariwisata
- b. Destinasi Pariwisata
- c. Pemasaran
- d. Kelembagaan Kepariwisata

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata alam, maupun budaya. Tidak hanya wisatawan domestik saja yang banyak berkunjung ke Yogyakarta tetapi juga wisatawan mancanegara. Selain dijuluki sebagai kota pelajar, Kota Yogyakarta juga memiliki banyak sekali objek pariwisata, seperti halnya wisata sejarah yakni museum, wisata alam yakni pantai, pegunungan dan berbagai objek wisata lainnya. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan di wilayah Yogyakarta ini tentunya juga akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Banyaknya pendapatan asli daerah atau PAD tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga terhadap daerah tersebut. Berdasarkan statistik kepariwisataan DIY Tahun 2020 PAD DIY Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY mencapai Rp 285.748.213.791.

Tabel 1. 2

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2020

NO	Sumber	Kota	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul	Pemda DIY	Jumlah
1	Pajak Hotel & Restaurant	121.800.824.570	106.963.287.223	3.993.259.222	2.435.738.612	5.246.469		240.439.870.096
2	ajak Tontonan / Hiburan	3.870.424.584.00	8.375.071.998	263.763.420	3.827.500	99.578.500		12.612.666.002
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	-	2.201.720.000	16.889.349.750	3.314.492.000	9.187.882.860		31.593.444.510
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	-
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa / Kontrak / Bagi Hasil)	520.458.833	54.720.550	10.650.000	422.780.050	58.373.650	35.250.000	1.102.233.083
	TOTAL	126.191.707.987	117.594.799.771	21.157.022.392	6.176.838.162	14.592.595.479	35.250.000	285.748.213.791

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY 2020

Oleh karena itu, Pemerintah kota Yogyakarta meningkatkan target PAD dari yang semula pada APBD 2022 sebesar 582.331.660.409 menjadi sebesar 634.171.754.454 pada perubahan APBD TA 2022, langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan PAD ini diantaranya adalah dengan meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata, dengan menggali potensi pariwisata di wilayah yang sejalan dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 yaitu “Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Wilayah di sekitar Malioboro, Titik Nol, Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan, Taman Pintar, kemudian bergerak ke Taman Sari dan Kebun Binatang Gembiraloka, menjadi pusat utama daerah pariwisata yang ada di wilayah Yogyakarta. Jalan Malioboro merupakan pedoman pembangunan kota Yogyakarta pada tahun 1975 yang dikenal sebagai sumbu imajinatif. Sumbu imajinatif ini menghubungkan beberapa tempat yang ada di Yogyakarta, garis imajinatif ini menghubungkan Kraton Yogyakarta dengan Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di sebelah selatan.

Jalan Malioboro ini terletak di sebelah utara alun-alun utara Kraton Yogyakarta. Malioboro tidak hanya menjadi sumber sejarah berdirinya Kota Yogyakarta. Malioboro saat ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat di Yogyakarta. Kawasan Malioboro merupakan salah satu pusat kota dan juga ikon kota yang selalu menjadi tujuan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan Malioboro menjadi pusat kota karena memiliki berbagai fasilitas publik, seperti halnya terkait dengan kebudayaan, edukasi, dan perbelanjaan. Oleh karena itu kawasan Malioboro digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan mereka melalui perdagangan dan jasa (sektor non formal) yang diikuti oleh pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin hari semakin bertambah banyak. Adanya pedagang kaki lima di kawasan Malioboro semakin menambah tingkat kunjungan yang ada di Malioboro. Hal ini terjadi karena sebagian besar pedagang kaki lima ini menawarkan dagangannya ke pengunjung di trotoar yang semestinya digunakan oleh pengunjung sebagai jalur

pejalan kaki. Selain itu juga dengan semakin banyaknya pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Malioboro juga menimbulkan perebutan lahan parkir (*on street parking*) yang menyebabkan semakin padatnya kawasan Malioboro.

Kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menata wilayah Malioboro ini menjadi tempat wisata yang nyaman bagi wisatawan. Menurut Iskandar dalam (Herdiana, 2018), kebijakan publik dapat di definisikan sebagai sebuah rangkaian keputusan, aksi, sikap, aktifitas ataupun sebuah program untuk bertindak atau tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor kebijakan (pembuat kebijakan) sebagai respon terhadap permasalahan yang ada. Nugroho dalam (Herdiana, 2018), menyebutkan bahwasannya kebijakan publik itu menyangkut beberapa hal yakni: Pertama, sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Kedua, bentuk peraturan pemerintah baik secara tertulis maupun tidak. Ketiga, sebagai bentuk kerjasama antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik pada hakekatnya adalah sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai bentuk respon terhadap permasalahan yang ada. Kebijakan publik ini bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan bangsa.

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) dikawasan Malioboro ini tidak semata-mata hanya untuk memindahkan kawasan Malioboro saja. Relokasi PKL Malioboro ini juga merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Teras Malioboro 1 dan 2 diharapkan mampu menjadi tempat masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan demikian maka kesejahteraan pedagang sekitar Malioboro dapat terjamin.

Atas dasar inilah isu terkait penataan kawasan Malioboro sudah menjadi pembahasan sejak tahun 2016 silam. Penataan kawasan Malioboro terkait lahan parkir dan juga penataan pedagang menjadi sebuah permasalahan yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Penerapan relokasi PKL yang berada di kawasan Malioboro yang sudah direncanakan sejak lama ini pada

akhirnya bisa dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Jogja) memutuskan untuk merelokasi sekitar 2.000 PKL Malioboro akan dipindahkan dari kawasan selasar Malioboro menuju Teras Malioboro 1 dan 2. Teras Malioboro 1 terletak di bekas Gedung Bioskop Indra, sedangkan Teras Malioboro 2 terletak di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY.

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro tentunya menuai banyak pro dan kontra. Sebagian masyarakat dan juga pedagang setuju dengan diadakannya relokasi ini karena selain memperindah kawasan malioboro juga para pedagang yang ada mendapatkan tempat yang layak untuk menjajakan dagangannya. Ada juga beberapa orang yang menolak adanya relokasi PKL ini karena adanya relokasi ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya, hal ini dibuktikan dengan puluhan pedagang pendorong gerobak yang sebelumnya berada di Selasar Malioboro tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di Teras Malioboro 1 ataupun 2. Terdapat sebanyak 91 orang yang kehilangan pekerjaannya pasca relokasi PKL di Malioboro, dan sebanyak 50 orang diantaranya tergabung dalam Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM). Kwat Suparjono, ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro memberikan beberapa alternatif bagi Pemkot Yogyakarta saat terjadi audiensi, yakni mereka mendapatkan tempat untuk berjualan di Teras Malioboro 1 atau 2, ataupun mendapatkan pekerjaan pengganti yakni sebagai juru parkir atau petugas kebersihan (Kuntadi, 2022).

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesejahteraan PKL Malioboro Pasca Relokasi di Teras Malioboro 1 dan 2.” Penelitian ini membahas sektor informal (pedagang kaki lima) dari sudut pandang pendekatan sosial dan ekonomi untuk menentukan dampak kebijakan relokasi PKL terhadap sosial dan ekonomi masyarakat pasca relokasi PKL Malioboro. Adanya permasalahan terkait kesejahteraan PKL pasca relokasi dikawasan Malioboro ini menjadi alasan utama dari peneliti untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan relokasi tanpa melihat dampak kesejahteraan PKL yang direlokasi. Disisi lain penelitian ini juga penting untuk mengetahui kesiapan Pemkot Yogyakarta dalam melaksanakan

Relokasi PKL Malioboro. Metode Penelitian ini mencoba menggunakan metode deskriptif kualitatif pencarian data yang dilakukan secara langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana kesejahteraan PKL Pasca Relokasi PKL Di Teras Malioboro 1 dan 2?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disusun, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi yang dirasakan PKL Malioboro.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kajian studi ilmu pemerintahan, khususnya mengenai dampak tata ruang wilayah pariwisata terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian atas pembuatan kebijakan atau program kerja oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Jogja) dalam membuat kebijakan.

1. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan banyak manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya untuk penelitian lebih lanjut di bidang sosial dan ekonomi serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para pelajar pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Penulis berharap semoga di hari-hari berikutnya hasil penelitian ini benar-benar berguna bagi keperluan banyak pihak yang berkepentingan.

1.5. Literatur Review

Tabel 1. 3

Literatur Review

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon	Reynaldo Christian Aotama, Deavy Rosaline Henny Klavert (Rosyidie et al., 2021)	2021	Dampak dari adanya relokasi pedagang di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon ini terhadap sosial dan perekonomian mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada seperti misalnya adalah keamanan dan ketertiban, aspek kepastian hukum dan jaminan hukum, persaingan antar pedagang, kebersihan dan keteriban dan juga hubungan sosial antara pedagang lainnya.
2.	Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk	Rostiena Pasciana, Pupung	2019	Relokasi ini dilaksanakan di beberapa tempat di Garut, diantaranya adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan

	Memperindah Kota Garut	Pundenswari, Gina Sadrina (Pasciana et al., 2019)		Siliwangi, Jalan Ciledug dan sbeberapa tempat strategis lainnya. Oleh karena itu pemerintah merelokasi PKL ke Gedung PKL 1 dan 2 atau Gedung PKL Intan Medina 1 dan 2. Setelah berlangsung 7 bulan, PKL ini kembali menempati tempat-tempat sebelumnya dan meninggalkan Gedung PKL 1 dan 2. Penyebab kembalinya PKL ke tempat asalnya adalah ketidak setujuan PKL terhadap kebijakan program relokasi ini dan kurang begitu laku dan sepi pembeli yang mengakibatkan penurunan pendapatan PKL secara dratis.
3.	Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang	Mochammad Bisma Imanda, Rusdarti (Imanda & Rusdarti, 2020)	2020	Tlogosari merupakan salah satu <i>trade mark</i> kota Semarang. Usaha relokasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, ke Taman Suryokusumo. Akan tetapi para PKL ini selalu kembali ke tempat semula. Kembalinya PKL ke bantaran sungai Tlogosari ini adalah karena kurang tegasnya pemerintah dalam menertibkan pada pedagang, selain itu karena permintaan masyarakat yang menginginkan tempat transaksi yang mudah dijangkau dan nyaman.

4.	Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Alun-Alun Purworejo Tahun 2017-2018)	Tri Wahyuningsih (Wahyuningsih, 2018)	2018	Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi pedagang kaki lima dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari adanya terdapat tim yang dikhususkan untuk mengkomunikasikan relokasi, pesan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan lancar diikuti dengan antusiasnya para pedagang PKL, pemerintah juga menggunakan media untuk memberitahukan kebijakan relokasi pedagang, selain itu juga para PKL ini mau direlokasi ke tempat yang baru, yakni ke romansa kuliner purworejo dan mendapatkan <i>feedback</i> atau umpan balik yang positif terhadap relokasi yang dilaksanakan.
5.	Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tasikmalaya	Krisna Rahmatulloh (Rahmatulloh, 2018)	2018	Penataan pedagang kaki lima di Tasikmalaya yang dilakukan pemerintah terkait dapat dikatakan tidak sesuai. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak merata. Akibat tidak meratanya sosialisasi ini masih banyak sekali PKL yang masih menempati tempat-tempat strategis yang sebenarnya merupakan tempat yang termasuk zona merah PKL.

6.	Proses Komunikasi Pemerintahan Dalam Penataan Kawasan Malioboro Tahun 2015-2016	Erinda Alfiani Fauzi (FAUZI, 2018)	2018	Dalam penelitian ini membahas terkait proses komunikasi pemerintah berbeda dari proses komunikasi pada biasanya, dimana terdapat lobby, dan juga tarik ulur kepentingan politik. Meskipun demikian komunikasi pemerintah terkait relokasi juru parkir dan PKL di sekitar Malioboro dapat berjalan dengan dengan efektif dan lancar terhadap PKL karena komunikasi dapat bekerjasama terkait relokasi ini, sedangkan proses komunikasi sedikit terhambat dalam relokasi juru parkir di selasar malioboro. Akibatnya implementasi kebijakan relokasi ini tidak dapat berjalan dengan lancar.
7.	Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung	Indra Kristian (Kristian, 2021)	2021	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan pedataan PKL di Bandung ini memenuhi kriteria evaluasi kebijakan, yakni: evektifitas, efisiensi, kecukupan, responsitas, dan juga ketepatan. Dengan terpenuhinya kriteria ini maka pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan penataan PKL di Bandung dapat terlaksana secara maksimal. Agar penataan PKL ini dapat berjalan baik kedepannya maka diperlukan ketegasan pemerintah dalam menata PKL yang ada untuk kedepannya.

8.	Analisis Dampak Ekonomi Pada Relokasi dan Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Agung Banten	Wilda, Andriani	2021	Relokasi pedagang kaki lima di kawasan serang banten menuju kawasan Masjid Agung Banten merupakan lanjutan dari UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti membuktikan bahwasannya kebijakan tersebut membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan PKL dimana kesejahteraan PKL mengalami peningkatan setelah diadakannya relokasi ke tempat yang lebih layak.
9.	Analisis Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sigli Kabupaten Pidie	Rizki Saputra, Eddy Gunawan. (Saputra & Gunawan, 2019)	2019	Hasil penelitian dari 166 sample menunjukkan bahwasannya PKL di kawasan Segili mengalami penurunan pendapatan, dengan penurunan pendapatan tersebut maka kesejahteraan PKL juga mengalami penurunan. Sebelum diadakannya relokasi dengan pendapatan terendah sebesar Rp6.975.255,3 dan pendapatan tertinggi sebesar Rp7074685,8. Sementara itu setelah dilakukannya relokasi pendapatan terendah sebesar Rp3.555.108,0 dan pendapatan tertinggi sebesar Rp3.706.219,01.
10.	Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan PKL	Murtanti J.R., Septyani Widyastuti	2021	Setiap pemerintah daerah pastinya menginginkan daerahnya tertata dengan rapi sehingga dapat memberikan suasana

	di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya	(Rahayu & Widyastuti, 2021)	aman bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah yang nyaman adalah dengan melakukan penataan PKL yang ada di titik-titik strategis daerahnya, seperti halnya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dampak dari adanya penataan PKL memberikan dampak yang positif terhadap penataan wilayah akan tetapi berdampak negatif terhadap pendapatan PKL itu sendiri.
--	---------------------------------------	-----------------------------	---

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terfokus pada berbagai kebijakan Relokasi PKL yang selalu kembali ke tempat asal mereka berjualan, dan juga kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan relokasi PKL yang dinilai membuat berbagai permasalahan terkait dengan keindahan kota.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu konsep dasar sebuah negara dalam bentuk *regulations* untuk memecahkan suatu masalah public Anggara, S. (2014). Pandangan kebijakan publik menurut para ahli, yang salah satunya disebutkan oleh Carl J. Friedrich, mendeskripsikan bahwa kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang memuat sebuah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, ataupun oleh pemerintah dalam satu lingkup untuk menciptakan suatu tujuan tertentu (Suwitri, 2008). Menimbang dari

pernyataan seorang ahli tersebut, hadirnya kebijakan publik merupakan suatu solusi yang dihadirkan pemerintah untuk mengatasi problematika yang beredar dimasyarakat. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum.

Hakekat dari kebijakan publik salah satunya adalah mengatasi permasalahan yang beredar dimasyarakat. Realitasnya kebijakan pemerintah saat ini masih banyak permasalahan kemiskinan yang berada dimasyarakat belum terselesaikan. Permasalahan atau problematika yang belum terselesaikan tersebut salah satunya adalah kemiskinan, fenomena social masyarakat terkait permasalahan kemiskinan masih acap kali terjadi. (Ras, 2016), menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan, bahwa kemiskinan sendiri terbagi menjadi tiga dimensi mulai dari dimensi ekonomi, social budaya dan struktur politik. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Bantul saat ini telah membuat serangkaian program kerja yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan melalui aspek pariwisata, industry rumah dan pengelolaan sumberdaya baik itu alam atau non alam. Realitas implementasi kebijakan dan program kerja saat ini apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien, hadirnya penelitian ini sebagai bentuk analisis strategi pemerintah Bantul dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 membagi kebijakan menjadi tiga bagian yang saling bersinambungan yaitu Objective, tindakan legal atau sah secara hukum dan yang terahir hipotesis.

- a) Kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik sebagai tujuan ialah membicarakan persoalan perolehan, pencapaian, goal atau keberhasilan yang mengangyangkut masalah publik. Maknanya ialah bahwa kebijakan dibuat sebagai bentuk responsive terhadap permasalahan publik dalam upaya mengatasi permasalahan pada objective yang ingin dicapai.
- b) Kebijakan publik sebagai perilaku yang legal. Pilihan tindakan kebijakan bersifat legal yang didasari pada suatu otoritas dari

sebuah system pemerintahan. Pada konteks ini artinya kebijakan yang dibuat atas dasar tugas, wewenang dalam rangka membuat sebuah perencanaan, rancangan undang-undang atau aturan pemerintah maupun dalam rangka perencanaan anggaran yang di bahas dan di pertimbangkan di sebuah parlemen.

- c) Kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan publik sebagai hipotesis meknai bahwa sebua kebijakan sebagai melalui tahapan dasaran teori, model dan hipotesa mengaenai sebab dan akibat dari suatu kejadian isu publik. Kebijakan ini berorientasi pada asumsi-asumsi perilaku masyarakat, kebijaksanaan ini mendorong seseorang untuk menciptakan suatu gerakan.

Berdasarkan definisi-definisi penjelasan mengenai kebijakan menurut Menurut Bridgeman dan davis, 2004 dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan memiliki makna yang sedikit berbeda namun meiliki fungsi yagn sama sebagai pengatur. Kebijakan berorientasi pada tujuan, pencapaian dalam keinginan menyelesaikan suatu problem public. Kebijakan berorientasi pada arah atau alur pembuataanya yang di pimpin langsung oleh system pemerintahan yang dimana membuat suatu kebijakan adalah suatu hal yang legal, baik itu tahap perancangan undang-undang, anggaran serta pembuatan sebuah keputusan. Kebijakan sebagai hipotesa berorientasi hanya fokus pada asumsu-asumsi belaka pada perilaku manusia.

1.6.2. Kesejahteraan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan menurut (BPS, 2021), adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga.

Tingkat kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari ukuran yang bisa dilihat (fisik dan kesehatan) tapi juga hal-hal yang tidak dapat dilihat (spiritual).

Tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari 4 bentuk kesejahteraan berikut:

- a) *Economical well-being*, yaitu kesejahteraan ekonomi yang berarti sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Hal itu bisa berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran. Sedangkan outputnya adalah berupa manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.
- b) *Social well-being*, yaitu kesejahteraan sosial dengan indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan dan status serta jenis pekerjaan. Selain itu ada pula beberapa indikator lain yang digunakan yaitu penghargaan sosial dan dukungan sosial. Penghargaan disini bertindak sebagai pusat pengembangan manusia agar berperan dan berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai salah satu faktor penting seorang perempuan menikah.
- c) *Physical well-being*, yaitu kesejahteraan fisik dengan indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas dan tingkat morbiditas.
- d) *Psychological/spiritual mental*, yaitu kesejahteraan psikologi dengan indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stress, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminalitas dan tingkat kebebasan seks.

Ferguson Horwood dan Beutrais dalam (Purwanto & Taftazani, 2018), menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan material. Kesejahteraan ekonomi keluarga diukur berdasarkan pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran) sedangkan kesejahteraan material

diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang bisa diakses oleh keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik ada enam variabel yang bisa dijadikan ukuran atau takaran untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau sebuah keluarga, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan. Adpaun penjelasan mengenai masing-masing variabel tersebut :

- 1) Pendidikan: angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan sarana pendidikan, partisipasi penduduk usia sekolah.
- 2) Kesehatan: sarana kesehatan, tenaga kesehatan, angka kematian bayi dan penyebab kematian, angka harapan hidup, angka kesakitan penyakit menular dan cara pengobatan.
- 3) Gizi: penyediaan zat gizi dan asal bahan makanan, konsumsi energi dan protein, status gizi balita.
- 4) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga : pengeluaran rata-rata per kapita, pengeluaran untuk makanan, pengeluaran untuk bukan makanan serta distribusi pengeluaran.
- 5) Ketenagakerjaan: angka beban tanggungan kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, status pekerjaan dan lapangan pekerjaan, jam kerja dan upah buruh, profil tingkat pendidikan angkatan kerja.
- 6) Perumahan dan lingkungan: fasilitas perumahan dan lingkungan, serta keadaan tempat tinggal.

Kemudian Okamura dalam Takehara (2005:114) menyebutkan bahwasanya terdapat tujuh karakteristik dalam kesejahteraan sosial. Karakteristik kesejahteraan sosial tersebut adalah:

- 1) Tuntutan ekonomi yang stabil
- 2) Tuntutan pekerjaan yang layak
- 3) Tuntutan keluarga yang stabil
- 4) Tuntutan jaminan kesehatan

- 5) Tuntutan jaminan pendidikan
- 6) Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat
- 7) Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

Karakteristik di atas menjadi ukuran kesejahteraan dalam masyarakat sosial. Apabila tujuh karakteristik tersebut sudah terpenuhi secara otomatis kesejahteraan sosial tersebut terpenuhi. Pada dasarnya pengukuran dari tingkat kesejahteraan keluarga yang dapat diamati hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).

a) Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi digunakan sebagai salah satu tujuan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Sumito, dalam (Sasongko, 2022) menjadi dua bagian; pertama, Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan Negara. Pertama, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil pada bidang ekonomi. Salah satu indikator dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah adanya peningkatan pendapatan individu ataupun masyarakat, peningkatan pendapatan juga merupakan tujuan dari adanya pengembangan ekonomi. Menurut Yatim dan Hendargo dalam, (Sasongko, 2022), peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor- faktor produksi yakni: modal, keterampilan, teknologi, lahan usaha.

b) Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1992, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Karakteristik dalam keluarga sejahtera yakni keluarga dan seluruh anggota keluarga tersebut dapat menjadi pemrakarsa pembangunan, pelaksana, dan pengontrol. Keluarga juga memiliki peranan yang penting dalam menyaring berbagai hal-hal negatif dalam kehidupan yang nantinya dapat merusak kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan keluarga juga merupakan dampak dari kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dalam keluarga ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan antar keluarga. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Bab II Pasal 4 Ayat (2), terdiri dari 8 fungsi. Kedelapan fungsi keluarga tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

1.6.3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagang baik perorangan atau berkelompok dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya sebagai tempat berjualan, (Hariyani, 2021).

Sedangkan menurut (Allam et al., 2019), pedagang kaki lima, yaitu para pedagang yang menjajakan barang dan jasa secara berpindah karena tidak mempunyai tempat yang mapan, sektor informal menjadi pilihan yang menarik bagi sebagian masyarakat yang tidak tertampung di sektor formal. Kelebihan sektor informal diantaranya yaitu mudah untuk dimasuki, karena tidak memerlukan seleksi pendidikan, modal relatif kecil dan tidak terikat pada jam kerja.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan seseorang yang dengan modal yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan di tempat-tempat yang strategis dalam suasana lingkungan yang informal

a) Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Menurut Kartono, et.al. (1980: 3-7) dalam (Hariyani, 2021), secara umum ciri-ciri pedagang kaki lima diantaranya:

- 1) Pedagang yang terkadang juga sekaligus sebagai produsen.
- 2) Ada yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ada pula yang menetap di lokasi tertentu.
- 3) Secara umum menjajakan makanan dan minuman, serta barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- 4) Modal kecil dan terkadang hanya merupakan sarana bagi pemodal dengan memperoleh imbalan berupa komisi atas jerih payahnya.
- 5) Kualitas barang yang diperjualbelikan relatif rendah dan biasanya mutunya tidak berstandar.
- 6) Volume peredaran uang kecil dan para pembeli merupakan pembeli dengan daya beli rendah.
- 7) Usaha biasanya skala kecil dan merupakan family enterprise, yaitu anggota keluarga turut membantu dalam usaha itu.
- 8) Terdapat tawar-menawar antara penjual dengan pembeli.
- 9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh waktu, ada juga yang paruh waktu atau pada waktu senggang saja, serta musiman.

1.6.4. Relokasi

Relokasi merupakan sebuah usaha memindahkan suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan penataan lokasi agar menjadi lebih nyaman. Dalam KBBI, relokasi memiliki arti sebagai pemindahan tempat. Relokasi

sejalan dengan revitalisasi. Menurut Permen PU No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

Relokasi oleh Harianto dalam (Noviko, 2016), diartikan sebagai suatu usaha untuk menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan fungsi utamanya. Menurut (Purnomo, 2016), Relokasi merupakan pemindahan pedagang dari satu tempat ketempat lain. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pedagang, relokasi tidak hanya memindahkan para pedagang saja tetapi juga mempertimbangkan tempat yang akan dijadikan relokasi, karena pedagang bisa jadi kehilangan pelanggan, akses yang mudah dan biaya yang murah apabila pemerintah tidak memberikan tempat yang strategis.

Menurut Wet dalam, (Purnomo, 2016) dampak dari adanya relokasi adalah agar keadaan masyarakat yang direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum direlokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut dapat dilihat dari peningkatan tingkat pendapatan, keberagaman sumber pendapatan, status dan jaminan di lokasi yang baru, akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar. Kemudian terdapat 5 kategori nilai-nilai yang didapatkan oleh pedagang yang direlokasi, yakni: kemakmuran (*wealth*), kenyamanan (*comfort*), stimulasi, afiliasi, dan juga moralitas.

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa relokasi merupakan pemindahan tempat ataupun kelompok masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan tempat sehingga ada pihak yang dirugikan, dengan relokasi ini diharapkan tidak menghilangkan pekerjaan maupun tempat tinggal orang yang direlokasi, tetapi diharapkan mampu menjadikan masyarakat atau tempat tersebut menjadi semakin maju dan nyaman.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur raykatnya, peraturan ini muncul dikarenakan munculnya masalah di masyarakat. Peraturan ini berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan adanya peraturan ini maka kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan sebuah bangsa tersebut.

1.7.2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dirinya sendiri ataupun kebutuhan anggota keluarganya. Pengukuran kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari aspek pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).

1.7.3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat PKL merupakan profesi seseorang yang mengedepankan sektor informal. Mereka menawarkan barang ataupun jasa yang mereka miliki. Mereka menawarkan barang atau jasa mereka dengan menempati tempat-tempat strategis seperti misalnya trotoar.

1.7.4. Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan tempat ataupun kelompok masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan tempat sehingga ada pihak yang dirugikan, dengan relokasi ini diharapkan tidak menghilangkan pekerjaan maupun tempat tinggal orang yang direlokasi, tetapi diharapkan

mampu menjadikan masyarakat atau tempat tersebut menjadi semakin maju dan nyaman.

1.8. Definisi Operasional

Relokasi pedagang kaki lima di wilayah Malioboro menyebabkan tantangan baru bagi pedagang kaki lima. Adanya dampak yang ditimbulkan yaitu dampak ekonomi dan sosial. Untuk mengetahui dampak relokasi PKL Malioboro terhadap kesejahteraan PKL pada penelitian ini menggunakan tujuh indikator yang dikemukakan oleh Okamura dalam Takehara (2005:114) yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan PKL pasca relokasi sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Kesejahteraan PKL	1. Tuntutan ekonomi yang stabil	1. Penghasilan PKL 2. Beban keluarga yang ditanggung
		2. Tuntutan pekerjaan yang layak	1. Jam kerja 2. Status pekerjaan
		3. Tuntutan keluarga yang stabil	1. Pengeluaran untuk makanan 2. Pengeluaran untuk bukan makanan

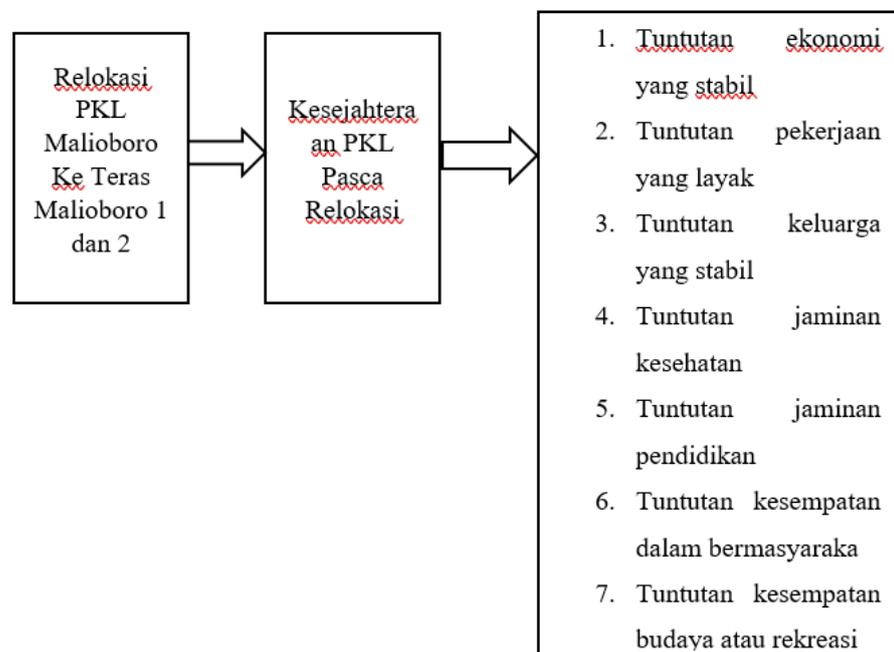
			serta distribusi pengeluaran.
		4. Tuntutan jaminan kesehatan	1. Kepemilikan jaminan kesehatan
		5. Tuntutan jaminan pendidikan	1. Angka melek huruf 2. Tingkat pendidikan yang ditamatkan 3. Partisipasi penduduk usia sekolah
		6. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat	1. Keadaan tempat tinggal 2. Fasilitas rumah

1.9. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk mempermudah pembaca dan peneliti dalam memberikan wawasan penelitian ini. Selain itu juga memiliki tujuan sebagai arah tujuan pada penelitian yang dilaksanakan. Berikut ialah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Bagan 1. 1

Kerangka Berfikir



Adanya alur penelitian tersebut sehingga peneliti dapat memberikan gambaran untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian ini. Berdasarkan alur diatas, peneliti nantinya akan mengkaji terkait Relokasi PKL Malioboro ketempat yang baru, yakni Teras Malioboro 1 dan juga Teras Malioboro 2. Relokasi ini bertujuan untuk menata wilayah Malioboro yang sudah direncanakan sejak lama, selain itu relokasi ini juga merupakan usaha Pemda DIY dalam mensejahterakan PKL di sekitar Malioboro. Maka dari itu, peneliti akan mengkaji terkait bagaimana kesejahteraan sosial ekonomi PKL Malioboro pasca relokasi menggunakan teori kesejahteraan sosial-ekonomi. Melalui teori kesejahteraan sosial-ekonomi

yang terdiri dari beberapa indikator, peneliti dapat mengetahui kesejahteraan PKL pasca relokasi Malioboro yang dilaksanakan pada 2 Februari 2022.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan berpikir deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan dalam mengatasi masalah dibutuhkan data secara langsung yang berkaitan. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap permasalahan yang ada, menjelaskan keadaan yang terkait dengan grounded theory, dan lebih memahami pengembangan akan suatu fenomena yang ada (Gunawan, 2016).

1.10.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Teras Malioboro 1 dan 2 dikarenakan Teras Malioboro 1 dan 2 ini merupakan tempat dimana para berjualan yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Malioboro. Teras Malioboro 1 terletak di Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122. Sedangkan Teras Malioboro 2 terletak di Jl. Malioboro No.56, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55212.

1.10.3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait indikator tuntutan ekonomi yang stabil, tuntutan pekerjaan yang layak, tuntutan keluarga yang stabil,

tuntutan jaminan kesehatan, tuntutan jaminan pendidikan, tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat, dan tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi, didapatkan secara langsung melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. kemudian hasilnya diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi atau kata. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, dan PKL Teras Malioboro 1 dan 2.

Tabel 1. 5
Data Primer

No.	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kepala Seksi Layanan Bisnis UKM Daerah Istimewa Yogyakarta	Wawancara
2.	Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	Wawancara
3.	PKL Teras Malioboro 1	Wawancara
4.	PKL Teras Malioboro 2	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder secara universal berbentuk catatan, bukti, atau laporan yang tersusun dalam arsip atau biasa disebut dengan data documenter (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk studi Pustaka atau penelitian terdahulu, dan dokumen terkait relokasi PKL Malioboro.

Tabel 1. 6

Data Sekunder

No.	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta	Dokumentasi
2.	Dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Dokumentasi
3.	Jumlah PKL Teras Malioboro 1 dan 2	Dokumentasi
4.	Data Pengelolaan PKL Teras Malioboro 1 dan 2	Dokumentasi
5.	Data Tingkat Kesejahteraan PKL Teras Malioboro 1 dan 2	Dokumentasi
6.	Jurnal Penelitian Terdahulu	Dokumentasi
7.	Berita Online terkait Teras Malioboro 1 dan 2	Dokumentasi

1.10.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu tahapan untuk menyatukan data dengan menggunakan berbagai cara atau teknik-teknik yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan berbagai data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

a) Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik atau tahapan yang bisa dikatakan gerbang awal suatu penelitian karena Ketika

akan menelaah suatu isu atau permasalahan lebih jauh maka dibutuhkan pengamatan secara detail atau bisa disebut dengan observasi. Adanya teknik observasi dalam mengumpulkan data ini memudahkan peneliti dalam memahami lebih jauh ataupun menelaah isu yang sedang diteliti. Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah berupa pengamatan terkait paguyuban PKL, lapak PKL, aktivitas perdagangan PKL, dan aktivitas keluar masuknya barang dagangan.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan subyek penelitian dan dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian untuk memahami lebih dalam mengenai situasi sosial yang diinformasikan dengan bahasa sendiri (Huberman & Miles, 1992). Teknik wawancara bisa dikatakan sebagai percakapan dua arah antara peneliti dengan subyek yang diteliti untuk menemukan suatu data atau fakta yang ada di lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu serta berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan yakni sebanyak empat PKL yang menjual makanan, oleh-oleh, pakaian, dan juga pernak-pernik. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menggali lebih banyak informasi dari responden sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Mekanisme yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan surat persetujuan wawancara, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara runtut kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Yogyakarta, serta

Masyarakat (PKL) terkait dengan indikator yang telah ditentukan yakni indikator tuntutan ekonomi yang stabil, tuntutan pekerjaan yang layak, tuntutan keluarga yang stabil, tuntutan jaminan kesehatan, tuntutan jaminan pendidikan, tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat, dan tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi.

Tabel 1. 7
Unit Analisa Data

No.	Instansi	Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepala Seksi Layanan Bisnis UKM Yogyakarta	Satu (1)
2.	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	Satu (1)
3.	Masyarakat (Pedagang Kaki Lima)	Pedagang Kaki Lima Teras Malioboro 1	Empat (4) dengan ketentuan: 1. Pedagang Pakaian satu (1) orang 2. Pedagang oleh-oleh

			<p>satu (1) orang</p> <p>3. Pedagang kuliner satu (1) orang</p> <p>4. Pedagang kerajinan satu (1) orang</p>
4.	Masyarakat (Pedagang Kaki Lima)	Pedagang Kaki Lima Teras Malioboro 2	<p>Empat (4) dengan ketentuan:</p> <p>5. Pedagang Pakaian satu (1) orang</p> <p>6. Pedagang oleh-oleh satu (1) orang</p> <p>7. Pedagang kuliner satu (1) orang</p> <p>8. Pedagang kerajinan satu (1) orang</p>

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari instansi resmi pemerintah terkait. Dokumen tersebut berbentuk arsip, catatan, dan berbagai bentuk berita online terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima Teras Malioboro. Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah berupa pengambilan foto lapak PKL, aktivitas perdagangan PKL, dan aktivitas keluar masuknya barang dagangan.

1.10.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat bagian analisis data sebelum terjun ke lapangan. Menurut Sugiyono dalam (Bruno, 2019) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses dalam penyusunan secara terstruktur dari data yang didapatkan dari berbagai teknik yang dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam berbagai unit, melalui sintesis, kemudian di susun dan dipilih yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan sehingga dengan mudah dimengerti oleh orang lain ataupun diri sendiri. Kemudian menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan usaha yang dilaksanakan dengan mengelompokkan data, memilih-milih data menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskannya, menemukan pola, dan hal yang penting untuk dapat dipelajari. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah atau tahapan:

a. Pengumpulan data

Dalam tahap pengumpulan data ini keseluruhan data yang dilakukan oleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dilaksanakan dengan turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah data terkait dengan relokasi PKL Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2, selain itu juga data terkait dengan kesejahteraan sosial-ekonomi PKL Malioboro yang di relokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data di Layanan Bisnis UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, dan juga Teras Malioboro 1 dan 2, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini terkait dengan dampak relokasi PKL Malioboro terhadap kesejahteraan PKL Malioboro.

b. Reduksi data

Tahapan reduksi data dilakukan dengan merangkum ataupun menyeleksi beberapa hal yang dikira penting kemudian dicari tema dan pola atau dengan kata lain tahapan ini merupakan tahap dalam menyederhanakan dan memilih temuan data yang sudah didapatkan di lapangan. Pada tahap reduksi data ini peneliti akan mengambil poin-poin penting yang terkait dengan tema penelitian. Reduksi data ini dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung. Dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian peneliti akan memilih data-data yang terkait dengan tema penelitian.

c. Penyajian data

Tahapan penyajian data ini biasanya disajikan dengan bentuk penjabaran atau uraian singkat, bagan, dan korelasi antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada hakikatnya penyajian data ini menjelaskan keseluruhan informasi yang sudah terkumpul. Setelah mendapatkan poin-poin penting pada tahapan reduksi data, selanjutnya peneliti akan membuat sajian data yang mendeskripsikan temuan mengenai dampak relokasi PKL Malioboro ke Teras

Malioboro 1 dan 2 terhadap kesejahteraan PKL Malioboro. Sajian data informasi ini diperoleh dengan metode sebelumnya dan informasi tersebut tentunya sudah diseleksi dan dikerucutkan berdasarkan penting atau tidaknya.

d. Tahapan Verifikasi

Tahapan terakhir dari analisis data adalah tahap verifikasi atau biasa disebut dengan tahapan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang valid akan penelitian dan menemukan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan melakukan proses tersebut maka data yang diperoleh dari lapangan dapat lebih valid dan terjamin (Sugiyono, 2016). Keseluruhan data-data penting terkait dampak relokasi PKL Malioboro terhadap kesejahteraan PKL yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi dan juga studi pustaka kemudian data tersebut akan diolah dan ditarik kesimpulannya.

Bagan 1. 2

Bagan Analisis Data

